Dikritisi Dewan Meski Raih WTP Ke-12, Ridwan Kamil: Itu Prestasi, Tapi Selalu Ada Saja Pertanyaan

Category: Daerah
7 Juli 2023

DPRD: Banyak Program Ridwan Kamil di Provinsi yang Belum Terealisasi

BANDUNG, Prolite – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil hadir di Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat.

DPRD Provinsi Jawa Barat mengkritisi sejumlah program Pemprov Jabar.

Kritikan itu disampaikan dalam pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022.

Fraksi Gerindra, PKS, PDIP, Golkar, PKB, PAN, dan NasDem

Persatuan Indonesia hampir semua mengkritisi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022.

Masing-masing perwakilan fraksi meminta Pemprov melalui Gubernur Ridwan Kamil menyampaikan secara detail pertanggunjawaban anggaran tersebut.

Disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Haru Suandharu realisasi APBD 2023 ini sudah mensejahterakan warga Jawa Barat atau kah belum.

“Selamat diraih WTP yang ke 12, itu luar biasa terima kasih Pemprov Jabar, tinggal evaluasi bagaimana hasil WTP dari konteks kemanfaatan untuk menyejahterakan masyarakat. Catatan seperti pembangunan jalan digeber 2023 padahal bisa 2022, lalu beberapa daerah dinyatakan miskin ekstrim. Pada akhirnya seberapa sejahtera rakyat Jabar bukan sebarapa mentereng fisik Pemprov Jabar,” jelas Haru di ruang Paripurna Provinsi Jabar, Kamis (6/7/2023).

Lanjutnya bukan hanya hal-hal fisik saja tapi kualitatif pun perlu jadi perhatian, terlebih visi Jabar Juara Lahir Batin.

“Kita jangan hanya bicara meningkat tercapai, tapi lihat juga indikator lain tercapai tidak, bisa jadi WTP tapi kita mengemukan indikator lain misal pengangguran, kekerasan, dan sebagainya,” ucapnya.

Disinggung program petani milenial, kata Haru, sudut pandang DPRD berbeda dengan Pemprov, jika Pemprov menilai sekian berhasil. DPRD malah menerima pengaduan masyarakat, banyak petani milenial terlilit hutang ke bank bahkan hingga bangkrut.

“Itu harus konfirmasi, apalagi rencana pembangunan daerah (RPD) anggaran petani milenial naik lagi nah kalau ini belum selesai nanti jadi banyak masalahnya. Sekarang anggaran satu miliar, diusulkan belum tahu berapa, kita ingin program itu benar-benar meningkatkan harga tukar petani. Jadi selogan

tinggal di desa rejeki di kota itu benar petani sejahtera, bukan dikejar kejar bank. Kami minta Pemprov jangan tinggalkan dampingi terus sampai berhasil, namanya juga petani baru banyak gagal dibanding suksesnya," ucap Haru.

Selain haru perwakilan dari Fraksi PKB pun meminta penjelasan terkait kesejahteraan bagi pesantren dan guru ngaji.

Ditempat yang sama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan acara kali ini guna pertanggungjawaban tentang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 12.

"Di dalamnya ada hal-hal yang perlu dijelaskan secara pencapaian terbaik di atas 96%, pendapatan melebihi target WTP itu kan sebenarnya prestasi cuma tetap selalu ada pertanyaan," singkat Emil sapaan akrabnya.